

STRATEGI IMPLEMENTASI HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA SUNGAI PENOBAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

Puteri Damayanti^{1,*}, Leti Sundawati², Soni Trison²

¹Program Studi Magister Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, IPB University, Baranangsiang, Kota Bogor, 16129, Indonesia

²Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University, Dramaga, Bogor, 16680, Indonesia

*Email: puteridamayanti@apps.ipb.ac.id

ABSTRAK

Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Jambi menghadapi tantangan ganda: konservasi lingkungan pasca deforestasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara target kebijakan dengan implementasi di lapangan. Kajian ini bertujuan merumuskan strategi implementasi HKm yang bersifat adaptif melalui analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT) di Desa Sungai Penoban, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian kualitatif deskriptif ini mengumpulkan data dari tiga Kelompok Tani Hutan (KTH), melibatkan 15 informan kunci, dan menggunakan triangulasi data serta analisis tematik. Hasil utama menunjukkan bahwa kekuatan (tingginya partisipasi dan kesadaran masyarakat) dan peluang (dukungan kebijakan dan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu/HHBK) dihadapkan pada kelemahan (terbatasnya permodalan dan keterampilan) dan ancaman (deforestasi ilegal dan fluktuasi harga HHBK). Analisis *Strengths-Opportunities* (SO) dan *Weakness-Opportunities* (WO) merekomendasikan fokus pada diversifikasi usaha HHBK melalui kemitraan pendanaan hijau, sedangkan *Strengths-Threats* (ST) dan *Weakness-Threats* (WT) menekankan perlunya kebijakan pengawasan adaptif berbasis partisipasi masyarakat untuk mitigasi deforestasi dan perubahan iklim. Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah pentingnya pergeseran dari kebijakan berbasis proyek menjadi kebijakan kelembagaan adaptif yang memperkuat sinergi pemerintah dan masyarakat dalam program HKm.

Kata Kunci: analisis SWOT, Hutan Kemasyarakatan, kebijakan adaptif, pembelajaran kebijakan, sinergi kelembagaan

STRATEGY FOR IMPLEMENTATION OF COMMUNITY FORESTRY IN SUNGAI PENOBAN VILLAGE, WEST TANJUNG JABUNG REGENCY, JAMBI PROVINCE

ABSTRACT

The Community Forest Management (HKm) program in Jambi faces a dual challenge: environmental conservation post-deforestation and improving community welfare, creating a gap between policy targets and on-the-ground implementation. This study aims to formulate an adaptive HKm implementation strategy through SWOT analysis in Sungai Penoban Village, West Tanjung Jabung Regency. This descriptive qualitative research collected data from three Forest Farmer Groups (KTH), involving 15 key informants, using data triangulation and thematic analysis. The main results indicate that strengths (high community participation and awareness) and opportunities (policy support and potential Non-Timber Forest Products/NTFPs) are counterbalanced by weaknesses (limited capital and skills) and threats (illegal deforestation and NTFP price fluctuations). The SO and WO analyses recommend focusing on NTFP business diversification through green funding partnerships, while ST and WT emphasize the need for adaptive monitoring policies based on community participation to mitigate deforestation and climate change. The policy implication of these findings is the importance of shifting from project-based policies to adaptive institutional policies that strengthen the synergy between government and the community in the HKm program.

Keywords: adaptive policy, community forest management, institutional synergy, policy learning, SWOT analysis

PERNYATAAN KUNCI

- Keberhasilan Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Sungai Penoban bergantung pada kemampuan kelembagaan lokal untuk beradaptasi terhadap perubahan. Kekuatan utama program terletak pada tingginya partisipasi masyarakat dan dukungan eksternal.
- Namun, HKm masih menghadapi kelemahan struktural, yaitu keterbatasan akses permodalan dan keterampilan teknis dalam pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Untuk menjamin keberlanjutan, analisis strategi merekomendasikan pembelajaran kebijakan (*policy learning*) yang fokus pada diversifikasi ekonomi HHBK melalui kemitraan pendanaan hijau dan perumusan kebijakan pengawasan adaptif.
- Ancaman deforestasi ilegal, fluktuasi harga hasil hutan, dan perubahan iklim perlu strategi mitigasi yang lebih baik untuk memastikan keberlanjutan program HKm di masa depan.
- Keberhasilan implementasi HKm di Desa Sungai Penoban sangat bergantung pada kemitraan yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendamping, serta pengelolaan yang adaptif terhadap tantangan yang ada. Dengan memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal yang ada, program ini berpotensi menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi keberlanjutan hutan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi implementasi HKm di Sungai Penoban sangat bergantung pada pergeseran paradigma kebijakan, dari sekadar alokasi izin menjadi fokus pada kebijakan adaptif. Implikasi utama adalah perlunya pemerintah daerah dan pusat untuk merumuskan kebijakan yang menjamin struktur kelembagaan fleksibel. Kebijakan harus mendorong kemandirian Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam merespons ancaman lokal (deforestasi ilegal dan perubahan iklim) tanpa menunggu instruksi vertikal (*policy learning*). Hal ini diwujudkan melalui legalitas penuh KTH sebagai mitra pengawas resmi. Keberlanjutan Ekonomi Komunitas dalam hal kebijakan pendanaan dan pasar harus diprioritaskan untuk HHBK dan ekowisata, yang terbukti lebih tangguh terhadap fluktuasi harga dan ramah lingkungan. Intervensi kebijakan harus bergeser dari penyediaan modal kerja konven-

sional menjadi skema pendanaan hijau (*green financing*) yang mempertimbangkan risiko ekologis.

Mekanisme *Policy Learning*: Kebijakan di tingkat pemerintah daerah harus dirancang untuk secara sistematis mengumpulkan data keberhasilan HKm, termasuk diversifikasi HHBK dan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan pembangunan sektoral berikutnya (Dinas Pertanian, Dinas Koperasi), memastikan sinergi dan efektivitas program HKm dalam jangka panjang.

PENDAHULUAN

Hutan di Indonesia memiliki peran krusial dalam konservasi ekologis dan kesejahteraan sosial, dengan luas kawasan hutan mencapai 125,76 juta ha pada tahun 2023 (Kementerian Kehutanan 2025). Pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga hutan dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengelolaan hutan di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan, melindungi keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suhartati *et al.* 2021).

Saat ini masih ditemukan berbagai pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat dan terbukti masih dapat menyelamatkan hutan dari ancaman kepunahan. Hal ini karena pola hubungan antara masyarakat dengan hutan masih dilakukan menurut kaidah lingkungan yang lebih mengutamakan keselarasan keseimbangan alami dibandingkan kepentingan ekonomi semata (Keraf 2005). Pemberian hak kelola kawasan hutan dan sumber daya alam kepada masyarakat dilakukan agar masyarakat dapat menerima manfaat untuk kebutuhan sendiri maupun menambah penghasilan (Paramita *et al.* 2017). Berbagai kajian kelembagaan lokal telah menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan oleh masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kekuatan nilai dan norma yang telah mengakar dan diterima secara luas oleh masyarakat (Meinzen-Dick 2007; Ostrom, 1990; Murray *et al.* 2006; Nursidah *et al.* 2012; Krey 2012; Ohorella *et al.* 2011; Jesica *et al.* 2019). Pendekatan kelembagaan adaptif yang menggabungkan kapasitas pembelajaran, mekanisme pemantauan, dan jaringan kemitraan multipihak terbukti mening-

katkan efektivitas pengelolaan perhutanan sosial (Ostrom 1990; Berkes *et al.* 2003; Folke 2006).

Perhutanan Sosial (PS) merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dikelola oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Perhutanan sosial diatur melalui berbagai skema yang memberikan hak Kelola kepada masyarakat (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keseimbangan lingkungan, dan mempertahankan dinamika sosial budaya. Program PS kini menjadi kebijakan strategis dalam bidang kehutanan sebagai program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui distribusi pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan (Supriyanto 2018; Akbar *et al.* 2025).

Adanya permasalahan berupa perambahan Kawasan hutan di berbagai daerah akan berpengaruh terhadap pelestarian hutan dan timbulnya masalah tenurial sehingga segera memerlukan implementasi program PS secara tepat (Marwa *et al.* 2010; Nurrochmat *et al.* 2017). Program ini menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan lestari. Target penetapan alokasi lahan perhutanan sosial oleh pemerintah seluas 12,7 juta ha, meskipun setelah 10 tahun target tersebut belum tercapai. Berdasarkan Siaran Pers Nomor SP.124/HUMAS/PPIP/HMS.3/6/2024 pada 20 Juni 2024, capaian program perhutanan sosial pada Mei 2024 mencapai 7,08 juta ha (Syahrony 2024).

Provinsi Jambi memiliki luasan hutan yang signifikan (1.335.000 ha) dan menjadi wilayah kunci implementasi PS (Supriatno 2021). Namun, wilayah ini sering menghadapi tantangan serius, seperti kebakaran hutan dan deforestasi ilegal (Kaswanto dan Nakagoshi 2014; Dewi 2018), yang mengancam keberlanjutan ekosistem. Desa Sungai Penoban menjadi contoh kasus yang relevan, di mana pasca-kebakaran hutan 2015, masyarakat menginisiasi HKm dan memperoleh izin resmi pada tahun 2018. Inisiatif ini merupakan upaya nyata untuk beralih dari eksploitasi ke pengelolaan berbasis masyarakat.

Meskipun inisiatif HKm telah berjalan, terjadi kesenjangan penelitian (*research gap*) antara implementasi kebijakan yang bersifat top-down

dengan kebutuhan nyata di tingkat tapak yang bersifat dinamis. Kebijakan HKm sering kali berfokus pada perizinan, namun kurang menyentuh aspek kebijakan adaptif dan pembelajaran kebijakan yang memungkinkan masyarakat merespons ancaman eksternal seperti perubahan iklim, deforestasi, dan fluktuasi harga pasar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi implementasi program HKm di Desa Sungai Penoban. Pendekatan Analisis SWOT dipilih karena relevan sebagai justifikasi akademik dalam studi kebijakan untuk mengidentifikasi dan memetakan secara sistematis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan yang ringkas dan berbasis bukti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif mengenai sinergi antara aspek kelembagaan, ekonomi, dan ekologi, serta merekomendasikan strategi kebijakan adaptif untuk menjamin keberlanjutan program HKm.

SITUASI TERKINI

Program HKm di Desa Sungai Penoban, merupakan inisiatif penting yang dimulai pasca kebakaran hutan yang melanda kawasan tersebut pada tahun 2015. Masyarakat Desa Sungai Penoban, yang sebelumnya bergantung pada eksploitasi hutan secara tidak berkelanjutan, kini berusaha untuk beralih ke pengelolaan hutan berbasis masyarakat guna memastikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Sejak memperoleh izin pengelolaan HKm Kementerian Kehutanan pada tahun 2018, program ini telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

Namun, meskipun sudah ada kemajuan, program HKm masih menghadapi berbagai tantangan. Ketergantungan masyarakat terhadap sumber pendapatan dari hasil hutan yang rentan terhadap fluktuasi harga dan perubahan iklim tetap menjadi masalah utama. Di sisi lain, keberhasilan program ini didorong oleh partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan dan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Program ini juga mendapat dukungan kebijakan dari pemerintah yang membuka peluang untuk pengembangan produk HHBK dan pendanaan hijau, yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat setempat.

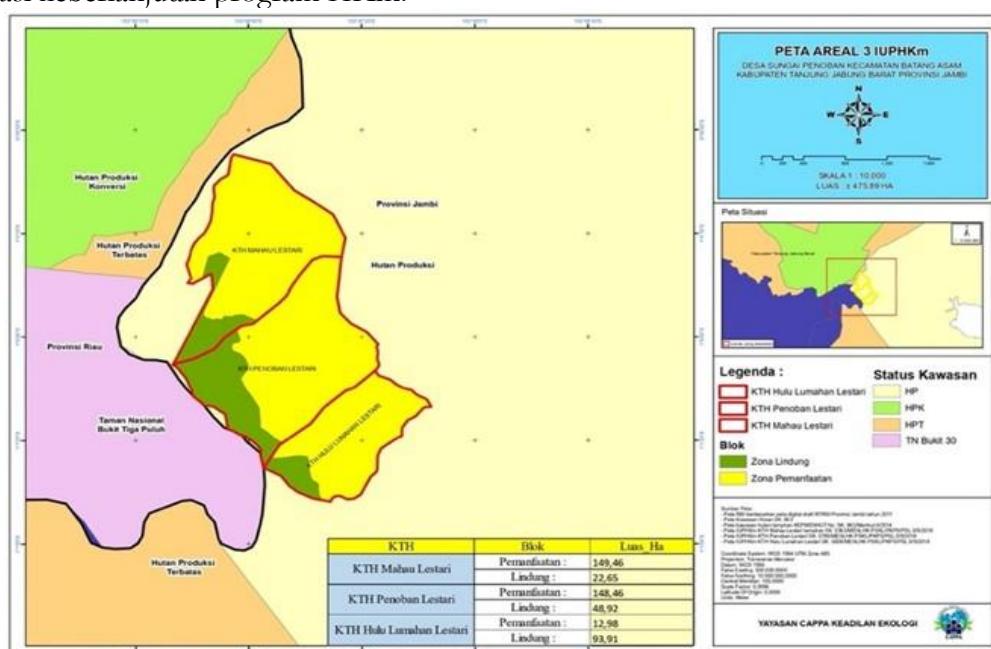
Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan signifikan, program HKm Desa Sungai Penoban menunjukkan potensi besar untuk berkontribusi pada keberlanjutan pengelolaan hutan, dengan menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberlanjutan program sangat penting untuk merumuskan strategi lebih efektif dalam mengoptimalkan potensi yang ada.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal yang difokuskan pada implementasi program HKm. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam konteks teknis, sosial, dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, serta keterkaitannya dengan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal. Menggunakan pendekatan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) dalam pelaksanaan program HKm. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, wawancara mendalam dengan *Stakeholder* kunci yang terlibat dalam program PS di Desa Sungai Penoban, serta observasi partisipatif terhadap kegiatan pengelolaan hutan yang berlangsung. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis tematik hasil wawancara dan observasi, serta analisis SWOT untuk mengevaluasi keberlanjutan program HKm.

Analisis tematik merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, karena memberikan pendekatan yang terstruktur dan fleksibel untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola yang ditemukan dalam data (Ahmed *et al.* 2025). Selain itu, pendekatan triangulasi data digunakan untuk meningkatkan validitas hasil analisis, dengan membandingkan temuan yang diperoleh dari berbagai sumber data, seperti wawancara, observasi, dan kajian literatur (Nurfajriani *et al.* 2024). Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai potensi dan tantangan dalam implementasi HKm, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung keberlanjutan program ini di masa depan.

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga bulan Mei 2025. Lokasi kegiatan penelitian ini berada di Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi yang secara legal dapat mengakses kawasan hutan dalam program perhutanan sosial dengan skema HKm sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yang telah di terima pada 3 KTH yaitu KTH Mahau Lestari, KTH Penoban Lestari dan KTH Hulu Lumahan Lestari untuk menganalisis implementasi program Perhutanan Sosial. Gambar 1 menunjukkan areal Izin Usaha Pemanfaatan HKm di Desa Sungai Penoban yang menjadi lokasi penelitian.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI/ PENANGANAN

Implementasi Program HKm di Desa Sungai Penoban, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

Implementasi program HKm di Desa Sungai Penoban, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, bertujuan untuk mengatasi tantangan lingkungan dan sosial-ekonomi melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Analisis SWOT terhadap program ini mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberlanjutan program. Kekuatan internal utama termasuk tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi terkait dengan pelestarian lingkungan dan partisipasi aktif dalam pengelolaan hutan, yang menjadi kunci keberhasilan program. Keberadaan modal sosial sebagai aset penghidupan masyarakat dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, partisipasi anggota kelompok, dan jaringan sosial (Hamzah *et al.* 2016; Ibisono dan Kartodihardjo 2019; Firnawati *et al.* 2021; Nurisyifa dan Kaswanto 2021; Inama *et al.* 2024). Namun, tantangan besar juga dihadapi, seperti ketergantungan pada sumber daya hutan, akses permodalan yang terbatas, dan rendahnya keterampilan pengolahan hasil hutan. Secara eksternal, peluang yang ada, seperti dukungan pemerintah dan potensi pengembangan produk HHBK, memberikan peluang untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi masyarakat. Ancaman seperti deforestasi ilegal, perubahan iklim, dan fluktuasi harga hasil hutan tetap menjadi masalah yang perlu dihadapi.

Analisis SWOT

Analisis SWOT terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), sementara faktor eksternal mencakup peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*). Faktor-faktor ini memberikan dampak positif dari kekuatan dan peluang, serta dampak negatif dari kelemahan dan ancaman. Dalam penelitian ini, penentuan bobot dan rating dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor internal yang memengaruhi keberhasilan implementasi HKm di Desa Sungai Penoban Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bobot mencerminkan tingkat kepentingan setiap faktor terhadap keberlanjutan program, yang diberikan pada skala 0 hingga 1 dengan total bobot keseluruhan berjumlah 1.

Rating digunakan untuk mengukur sejauh mana faktor tersebut dirasakan di lapangan dengan skala 1 hingga 4. Penilaian ini diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Skor kemudian dihitung dengan mengalikan bobot dengan rating, yang selanjutnya dijumlahkan untuk memperoleh subtotal kekuatan dan kelemahan. Dari hasil perhitungan, kekuatan memperoleh skor subtotal sebesar 1,46, sementara kelemahan memperoleh skor subtotal sebesar 0,74. Selisih sebesar 0,72 menunjukkan bahwa faktor kekuatan lebih dominan dibandingkan kelemahan, sehingga secara internal, program HKm di Desa Sungai Penoban memiliki beberapa potensi besar yang mendukung keberlanjutan (Tabel 1).

Tabel 1. Matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE) pengembangan pengelolaan HKm

No.	Faktor Internal	Rating	Bobot	Skor
Kekuatan (<i>Strengths</i>)				
1	Kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan meningkat	3,00	0,18	0,54
2	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan tinggi	3,00	0,13	0,39
3	Kesejahteraan ekonomi rumah tangga meningkat	2,80	0,09	0,25
4	Pengelolaan hutan berbasis masyarakat mendukung keberlanjutan ekosistem	2,80	0,10	0,28
Sub Total				1,46
Kelemahan (<i>Weakness</i>)				
1	Akses permodalan dan kredit usaha masih terbatas	1,43	0,17	0,24
2	Keterampilan pengolahan hasil hutan rendah	2,43	0,11	0,27
3	Ketergantungan sebagian masyarakat terhadap eksplorasi hutan masih ada	1,71	0,12	0,20
4	Kapasitas kelembagaan lokal belum merata	1,43	0,10	0,14
Sub Total				0,85
Total				1,00 (Selisih=0,61)

Analisis SWOT yang mengacu pada Rangkuti (1997) menunjukkan bahwa faktor internal dengan skor tertinggi pada kategori kekuatan adalah "Kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan meningkat" dengan skor 0,54. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman masyarakat tentang pentingnya kelestarian hutan menjadi modal utama dalam pengelolaan HKm yang berkelanjutan. Di sisi lain, faktor dengan skor terendah adalah "Ketergantungan sebagian masyarakat terhadap eksplorasi hutan yang tidak berkelanjutan" dengan skor 0,09, yang meskipun nilainya kecil, tetap berperan penting dalam menentukan arah pengelolaan hutan ke depan.

Untuk kelemahan, faktor dengan skor tertinggi adalah "Akses permodalan dan kredit usaha masih terbatas" dengan skor 0,24. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap pembiayaan menjadi hambatan utama dalam mengembangkan usaha berbasis hasil hutan

yang berkelanjutan. Sementara itu, faktor "Kapasitas kelembagaan lokal yang belum merata" memperoleh skor terendah yaitu 0,14, yang berarti meskipun menjadi kendala, dampaknya relatif lebih kecil dibandingkan dengan akses permodalan dan ketergantungan pada eksplorasi yang merusak hutan.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengelolaan HKm di Desa Sungai Penoban berada dalam kondisi yang cukup kuat, dengan kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif sebagai kekuatan utama. Namun, akses permodalan dan ketergantungan pada eksplorasi tidak berkelanjutan masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, strategi pengelolaan perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, akses permodalan, dan diversifikasi usaha berbasis hutan untuk menjamin keberlanjutan program HKm di masa depan.

Tabel 2. Matriks *External Factor Evaluation* (EFE) pengembangan pengelolaan HKm

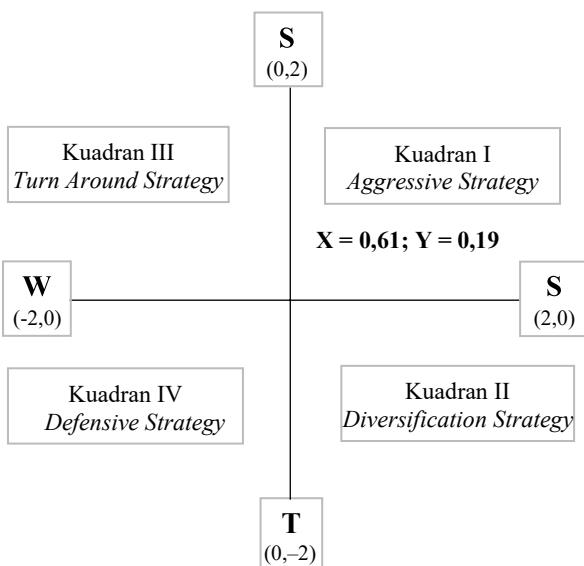
No.	Faktor Eksternal	Rating	Bobot	Skor
Peluang (Opportunities)				
1	Dukungan pemerintah terhadap program HKm meningkat	1,86	0,17	0,32
2	Peluang usaha berbasis HHBK terbuka luas	1,86	0,12	0,22
3	Program rehabilitasi dan reforestasi menjadi agenda prioritas nasional	2,43	0,09	0,22
4	Kesadaran global terhadap mitigasi perubahan iklim membuka peluang pendanaan hijau	2,57	0,12	0,31
Sub Total				1,07
Ancaman (Threats)				
1	Ancaman deforestasi akibat aktivitas ilegal dan eksplansi lahan	1,71	0,17	0,29
2	Perubahan iklim dan bencana lingkungan (banjir, longsor)	2,14	0,12	0,26
3	Fluktuasi harga hasil hutan di pasar lokal dan global	1,43	0,11	0,16
4	Kurangnya regenerasi pengelola muda dalam kegiatan HKm	1,71	0,10	0,17
Sub Total				0,71
Total				1,00 (Selisih=0,19)

Menurut Rangkuti (1997), dalam analisis faktor eksternal, peluang terbesar dalam pengelolaan HKm di Desa Sungai Penoban terdapat pada faktor "Dukungan pemerintah terhadap program HKm meningkat", yang memiliki bobot 0,17, rating 1,86, dan skor 0,32 (Tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah berperan signifikan dalam memperkuat pengelolaan hutan dan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh

sumber daya dan pelatihan yang dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan hutan. Selain itu, peluang "Kesadaran global terhadap mitigasi perubahan iklim membuka peluang pendanaan hijau" dengan skor 0,31 dan bobot 0,12 juga memberikan prospek besar, mengingat semakin tingginya perhatian terhadap pelestarian lingkungan global yang dapat mengarah pada peningkatan pendanaan bagi kegiatan konservasi hutan.

Sebaliknya, untuk ancaman, faktor "Perubahan iklim dan bencana lingkungan (banjir, longsor)" dengan bobot 0,12, rating 2,14, dan skor 0,26 menjadi ancaman paling signifikan. Hal ini karena perubahan iklim yang tidak menentu, dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem hutan, menghambat pertumbuhan vegetasi, dan meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam. Sementara itu, faktor "Ancaman deforestasi akibat aktivitas ilegal dan ekspansi lahan" dengan skor 0,12 juga menjadi ancaman besar, karena aktivitas ilegal, seperti penebangan hutan liar dan pembukaan lahan untuk pertanian, dapat merusak ekosistem hutan dan mengurangi keberlanjutan pengelolaan hutan (Afrianti *et al.* 2024).

Ancaman lain, seperti "Kurangnya regenerasi pengelola muda dalam kegiatan Hutan Kemasyarakatan" (skor 0,17), juga perlu diperhatikan, mengingat ketergantungan pada generasi yang lebih tua dalam pengelolaan hutan dapat membatasi inovasi dan kesinambungan pengelolaan hutan di masa depan. Berdasarkan hasil analisis *External Factor Evaluation* (EFE) yang dilakukan, terlihat bahwa peluang eksternal dengan subtotal skor 1,07 lebih besar daripada ancaman eksternal dengan subtotal skor 0,71, sehingga terdapat selisih sebesar 0,36. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan HKm di Desa Sungai Penoban masih berada pada posisi yang relatif menguntungkan dalam matriks SWOT (Gambar 2).



Gambar 1. Posisi strategi dalam pengembangan pengelolaan HKm

Gambar 2 menunjukkan posisi strategi dalam pengelolaan HKm di Desa Sungai Penoban

dalam Matriks SWOT. Posisi strategi ini berada pada strategi agresif (kuadran I: *Strengths-Opportunities*), yang mencerminkan bahwa HKm memiliki kekuatan internal yang cukup besar, seperti partisipasi aktif masyarakat dan kesadaran lingkungan, serta peluang eksternal yang menguntungkan, seperti dukungan pemerintah dan kesadaran global terhadap mitigasi perubahan iklim. Hal ini menunjukkan bahwa program ini berada dalam posisi yang relatif menguntungkan, dengan potensi untuk memaksimalkan keberlanjutan dengan memanfaatkan peluang yang ada.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan, seperti ancaman deforestasi akibat aktivitas ilegal dan perubahan iklim. Oleh karena itu, langkah strategis yang diperlukan adalah memanfaatkan kekuatan yang ada dan peluang eksternal untuk menjaga keberlanjutan. Strategi agresif ini menyarankan bahwa HKm di Desa Sungai Penoban perlu memperkuat kapasitas kelembagaan lokal, meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ilegal, serta mengembangkan alternatif sumber pendapatan berbasis HHBK. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan kerja sama dengan lembaga internasional dan pemerintah untuk pendanaan hijau, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konservasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan strategi ini, program HKm di Desa Sungai Penoban dapat terus berkembang, meskipun menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal.

Alternatif Solusi Strategis

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dijabarkan sebelumnya, untuk merumuskan strategi pengelolaan yang lebih efektif untuk keberlanjutan program HKm di Desa Sungai Penoban. Strategi-strategi yang disusun terdiri dari: *Strengths-Opportunities Strategy* (SO Strategy) untuk memaksimalkan kekuatan yang ada dan memanfaatkan peluang, *Strengths-Threats Strategy* (ST Strategy) untuk mengatasi ancaman dengan memanfaatkan kekuatan yang ada, *Weakness-Opportunities Strategy* (WO Strategy) untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, dan *Weakness-Threats Strategy* (WT Strategy) untuk mengurangi kelemahan dan menghindari risiko. Rekomendasi kebijakan tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3 Rekomendasi Kebijakan

Fokus Rekomendasi	Bukti Kunci (SWOT)	Tindak Lanjut Kebijakan (Adaptif)
1. Penguatan kelembagaan lokal adaptif	Kekuatan (S): Kesadaran tinggi masyarakat. Ancaman (T): Deforestasi ilegal dan perubahan iklim.	Pemerintah Daerah (Pemda) harus melegitimasi dan memperkuat peran Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam pengawasan hutan dan mitigasi dampak iklim. Kebijakan ini harus fleksibel (<i>adaptive</i>) dan mengizinkan modifikasi aturan lokal (Perdes) secara berkala.
2. Kebijakan diversifikasi ekonomi HHBK	Kelemahan (W): Ketergantungan pendapatan pada hasil hutan rentan fluktuasi. Peluang (O): Potensi pengembangan HHBK.	Mendorong Kebijakan <i>Off-Farm Activities</i> dan hilirisasi HHBK. Pemda harus menyediakan pendampingan teknis dan modal awal (bukan pinjaman) untuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dalam pengolahan dan pemasaran HHBK, mengurangi risiko fluktuasi harga.
3. Sinkronisasi program antar-sektor	Peluang (O): Dukungan kebijakan pemerintah. Kelemahan (W): Keterbatasan modal dan teknologi.	Menciptakan kebijakan sinergi multi-pihak di tingkat Kabupaten untuk menyinkronkan program pelatihan dan permodalan. HKm harus dilihat sebagai mata rantai dari kebijakan pengembangan desa secara holistik, bukan sekadar program kehutanan.

Dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk pengelolaan HKm di Desa Sungai Penoban, berdasarkan analisis SWOT, yaitu Strategi S-O. Strategi S-O berfokus pada pemanfaatan kekuatan internal yang dimiliki oleh program, seperti kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan (S1), partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan (S2), kesejahteraan ekonomi rumah tangga yang meningkat (S3), dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (S4) untuk memanfaatkan peluang eksternal, seperti dukungan pemerintah terhadap program HKm (O1), peluang usaha berbasis HHBK (O2), program rehabilitasi dan reforestasi (O3), serta kesadaran global terhadap mitigasi perubahan iklim yang membuka peluang pendanaan hijau (O4).

Rencana program pengelolaan perlu difokuskan pada pemanfaatan kekuatan internal dan peluang eksternal yang ada untuk memperkuat keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan kondisi wilayah yang memiliki kekuatan internal yang cukup besar, seperti partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan dan kesadaran lingkungan yang tinggi, serta peluang eksternal, seperti dukungan pemerintah terhadap program Hutan Kemasyarakatan dan kesadaran global terhadap mitigasi perubahan iklim yang membuka peluang pendanaan hijau.

Fokus utama program diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan lokal, dengan

memperkuat peran kelompok tani hutan dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Selain itu, program ini mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan HHBK, yang tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem hutan. Mengembangkan usaha berbasis HHBK, seperti ekowisata dan produk olahan hutan, akan menciptakan peluang ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat.

Program pertama, yaitu penguatan kapasitas kelembagaan lokal, berfokus pada peningkatan kemampuan kelompok tani hutan dan lembaga penyuluhan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Supriatno (2021), yang menyatakan bahwa penguatan kelembagaan lokal berperan penting dalam menciptakan sistem pengelolaan hutan yang efektif dan berkelanjutan. Program kedua, pengembangan usaha berbasis HHBK, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa merusak ekosistem hutan. Penelitian Mardiana dan Fauzi (2018) juga menunjukkan bahwa diversifikasi usaha berbasis HHBK, seperti ekowisata dan produk olahan hutan, dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dan mengurangi ketergantungan mereka pada eksplorasi yang tidak berkelanjutan.

Salah satu strategi utama adalah peningkatan kapasitas pengelola hutan melalui penyuluhan intensif tentang teknik pengelolaan hutan

berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem hutan meskipun menghadapi tantangan eksternal seperti perubahan iklim dan deforestasi ilegal (S1, S2, O3, O4). Strategi lainnya adalah penguatan peran kelembagaan lokal dan lembaga penyuluhan untuk membantu masyarakat agar tetap dapat memanfaatkan peluang pendanaan hijau dan dukungan kebijakan pemerintah (S3, O1, O2). Selain itu, pemanfaatan kelompok tani hutan untuk mengadopsi teknologi pengolahan HHBK yang ramah lingkungan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sambil menjaga kelestarian ekosistem (S4, O2).

DAFTAR PUSTAKA

Afrianti C, Widiarti NM, Akbar IZ, Rachmanto EP, Hanif MF, Amin RA, Kaswanto RL, Wiyoga H, Mosyaftiani A. 2024. An Assessment of Urban Forest Landscape Services for Green Space Management Improvement in Bandung City, West Java, Indonesia. *BIO Web of Conferences* 94: 04006. EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/bioconf/20249404006>.

Ahmed SK, Mohammed RA, Nashwan AJ, Ibrahim RH, Abdalla AQ, Ameen BMM, Khdir RM. 2025. Using Thematic Analysis in Qualitative Research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health* 6(2025): 100198. <https://doi.org/10.1016/j.jglmedi.2025.100198>.

Akbar IZ, Afrianti C, Kaswanto RL, Wiyoga H, Mosyaftiani A. 2025. The Role of Monitoring Carbon Storage and Sequestration in Advancing the Vision of Forest City: Lesson Learned from Urban Forest Assessment in Bandung, West Java. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1447(1): 012026. IOP Publishing.

Berkes F, Colding J, Folke C. 2003. Navigating Social–Ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change. Cambridge University Press. Inggris.

Dewi. 2018. Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan dan Program Perhutanan Sosial. *Info Tek. EBONI*. 15(2): 65–77. <https://doi.org/10.20886/buleboni.5155>.

Fauzi A. 2018. Teknik Analisis Keberlanjutan. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Firnawati, Kaswanto RL, Sjaf S. 2021. Mapping the Village Forest of Pattaneteang through Drone Participatory Mapping. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 879(1): 012028. IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/879/1/012028>.

Folke C. 2006. Resilience: The Emergence of A Perspective for Social–Ecological Systems Analyses. *Global Environmental Change*, 16(3): 253–267. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002>.

Hamzah H, Suharjito D, Istomo I. 2016. Efektifitas Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan pada Masyarakat Nagari Simanau, Kabupaten Solok. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 2(2): 116-128. <https://journal.ipb.ac.id/jkebijakan/article/view/10979>.

Ibisono RAA, Kartodihardjo H. 2019. Kelembagaan Hutan Rakyat Studi Kasus Kelompok Tani Taruna Tani Desa Karyasari Kecamatan Leuwiliang Bogor. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 4(3): 226-238.

Jesica J, Kaswanto RL, Arifin HS. 2019. Management of “Pekarangan” in Informal Settlement of Ciliwung River Riparian Landscape. *KnE Social Sciences* 3(2): 408-420. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i21.4984>.

Kaswanto RL, Nakagoshi N. 2014. Landscape Ecology-based Approach for Assessing Pekarangan Condition to Preserve Protected Area in West Java. *Designing Low Carbon Societies in Landscapes* 289-311.

Keraf AS. 2005. Etika Lingkungan. Kompas. Jakarta.

Krey DLY. 2012. Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan. Tesis. Fakultas Kehutanan. IPB University. Bogor.

Marwa J, Purnomo H, Nurrochmat DR. 2010. Managing The Last Frontier of Indonesia Forest in Papua. Faculty of Forestry. Bogor Agricultural University. Bogor.

Meinzen-Dick R. 2007. Beyond Panaceas in Water Institutions. PNAS [internet]. [diunduh 21 September 2025]. Vol.104 (39): 2.

http://http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2000530/.

Nurfajriani WV, Ilhami MW, Mahendra A, Sirodj RA, Afgani MW. 2024. Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(17): 826-833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.

Nurrochmat DR, Darusman D, Ruchjadi D. 2017. Rekonstruksi Sistem Tenurial Kehutanan. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 1(1): 24-29. <https://journal.ipb.ac.id/jkebijakan/article/view/10275>.

Nursidah, Nugroho B, Darusman D, Rusdiana O, Rasyid Y. 2012. Institutional Development to Build a Successfull Local Collective Action in Forest Management from Arau Watershed Unit. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 18(1): 18-30. <https://journal.ipb.ac.id/jmht/article/view/4741>.

Nuryasyifa F, Kaswanto RL. 2021. Kelembagaan Program Citarum Harum dalam Pengelolaan Sub DAS Cirasea, Citarum Hulu. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 8(3): 121-135. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v8i3.28064>.

Ohorella S, Suharjito D, Ichwandi I. 2011. Efektifitas Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan pada Masyarakat Rumahkay di Seram Bagian Barat, Maluku. Bogor. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 17(2): 49-55. <https://journal.ipb.ac.id/jmht/article/view/3973>.

Ostrom E. 1990. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press. New York

Paramita A, Sundawati L, Nurrochmat DR. 2017. Strategi Kebijakan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di Zona Tradisional Taman Nasional Ujung Kulon. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan* 4(1): 1-12. <https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v4i1.20075>.

[Permen] Peraturan Menteri. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Indonesia.

Rangkuti F. 1997. Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis. PT Gramedia. Jakarta.

Suhartati T, Purwanto RH, Setyarso A, Sumardi S. 2021. Karakteristik Pengelolaan Hutan Rakyat dalam Perspektif Sistem (Studi di Desa Semoyo Kabupaten Gunung Kidul). *Jurnal Hutan Tropis* 9(3): 355. <https://doi.org/10.20527/jht.v9i3.12336>.

Supriatno B. 2021. Provinsi Jambi Bisa Jadi Lokasi Percontohan Kehutanan Sosial. Bisnis.com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210302/99/1362649/provinsi-jambi-bisa-jadi-lokasi-percontohan-kehutanan-sosial>.

Supriyanto B, Karyana A, Rosdiana E, Tjiptono BH, Dwiyati N, Prasetyani CEP, Simanjuntak S, Nurhasnih, Rahmansyah TA, Sumarah AD, et al. 2018. Dampak Perhutanan Sosial: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan: KLHK. Jakarta.

Syahrony A. 2024. Perhutanan Sosial: Evolusi Upaya Negara Mewujudkan Keadilan Pengelolaan Lahan untuk Masyarakat. [internet]. [diunduh 21 September 2025]. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaranpers/7747/perhutanan-sosial-evolusi-upaya-negara-mewujudkan-keadilan-pengelolaanlahan-untuk-masyarakat>.